

DAFTAR PUSTAKA

- AR Pertiwi. (2024). Upaya Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan Data <https://doi.org/10.556442>
- Ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. (n.d.).
- Klikpajak. (2024). *Formulir Pajak*. <https://klikpajak.id/blog/formulir-pajak/>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (edisi revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- New.ddtc (2024) *Produksi SP2DK* <https://news.ddtc.co.id/produksi-sp2dk-sepanjang-2022-turun-begini-penjelasan-djp-1799118>
- Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengatur Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
- Peraturan Perpajakan Nomor 49 Tahun 2022. (2022). In PP No. 49 Tahun 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/232943/pp-no-49-tahun-2022>
- Pertiwi, A. R., Andini, A. P., Pangesti, N. G., & Firmandani, W. (2024). Studi Kasus : *Upaya Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Atas Kelalaian Penerbitan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Jurnal Manajemen Dan Organisasi (JMO), 15(3), 268–280. <https://doi.org/10.29244/jmo.v15i3.58532>
- Rahmah, F. D. N., & Susilowati, E. (2024). Analisis Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan. *Economic and Business Management International Journal* Mei, 6(2), 1–7. <https://doi.org/10.556442>
- Rivani, S., & Cheisviyanny, C. (2023). Respon Wajib Pajak Terhadap Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK). *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(1), 356–369. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.647>
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-390/PJ/2015 Tentang Pengawasan Waji Pajak Dalam Entuk Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan, Dan Kunjungan (Visit) Kepada Waji Pajak.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-390/PJ/2015 Tentang Pengawasan Waji Pajak Dalam Entuk Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan, Dan Kunjungan (Visit) Kepada Waji Pajak.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia (edisi terbaru)*. Jakarta: Salemba Empat.